

# **REKONSTRUKSI SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) BERBASIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

## ***ABSTRAK***

Perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam dunia perdagangan juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dapat timbul beda pendapat atau sengketa diantara para pihak. Para pihak yang bersengketa tersebut menginginkan agar sengketa yang timbul diselesaikan dengan sistem penyelesaian dalam waktu yang cepat dan tidak berbelit-belit.

Metode penelitian disertasi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai eksistensi sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sumber data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, UU No. 30 tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal, hasil penelitian di bidang hukum, hasil seminar, dan lain-lain. Teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Hasil penelitian menemukan 1. Dalam Aturan dan prosedur BANI yang dibuat dengan tetap mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30 tahun 1999 terdapat kelemahan. Berdasarkan hasil penelitian ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30 tahun 1999 tersebut masih terdapat kelemahan. 2 Terdapat kelemahan dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa yaitu a) Kelemahan pada substansif hukum, b) Kelemahan pada struktural hukum, c) Kelemahan pada budaya hukum, 3. Maka perlu untuk dilakukan rekonstruksi terhadap UU No. 30 tahun 1999.

Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan untuk melakukan rekonstruksi terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang a) Perlu penegasan terhadap pihak ketiga diluar perjanjian yang dapat ikut serta dalam perkara arbitrase yang sedang berjalan. b) Pada saat pengajuan bukti-bukti surat atau dokumen tertulis lainnya para pihak harus dapat memperlihatkan aslinya, c) Bantuan pengadilan negeri untuk meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang tidak bersedia atau berhalangan hadir ke persidangan arbitrase. d) Terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan itikad buruk, maka terhadap putusan tersebut dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri

Kata kunci : *Rekonstruksi, Sistem Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Keadilan Dan Kepastian Hukum*

# **THE RECONSTRUCTION OF AN OUT-OF-COURT DISPUTE RESOLUTION SYSTEM THROUGH THE INDONESIAN NATIONAL ARBITRATION BOARD BASED ON JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY**

## **ABSTRACT**

Agreements made by business actors in the world of trade must also be carried out in accordance with applicable regulations. However, in the implementation of the agreement, differences of opinion or dispute may arise between the parties. The parties to the dispute want the disputes that arise to be resolved by a resolution system in a quick and straightforward manner.

This dissertation research method is conducted using the normative juridical research method using the constructivism paradigm. The specifications of this study are normative juridical research to thoroughly examine the existence of alternative dispute resolution systems outside the court. The data source used in this dissertation research is primary legal material consisting of the Constitution (UUD1945), Law No. 30 of 1999. And the statutory regulations and secondary legal materials used in this study are legal materials that support primary legal materials, such as law books, journals, research results in the field of law, seminar results, and others. Data analysis technique is done by analyzing primary and secondary legal materials related to the resolution of disputes through arbitration.

The research found: 1) In BANI's rules and procedures, which are made by referring to the provisions contained in Law No. 30 of 1999 there are weaknesses. Based on the research results of the provisions contained in Law No. 30 of 1999 there are still weaknesses 2) There are weaknesses in law No. 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution, namely a) Weaknesses in the substantive law, b) Weaknesses in legal structures, c) Weaknesses in legal culture. 3. So it is necessary to reconstruct Law No. 30 of 1999.

Based on the results of the study it is recommended: to reconstruct the provisions contained in Law No. 30 of 1999 concerning a) Expanding confirmation of third parties outside the agreement who can participate in the ongoing arbitration case. b) When submitting documentary evidence or other written documents, the parties must be able to show the originals, c) District court assistance to request information against witnesses who are unwilling or unable to attend the arbitration trial. d) Regarding the arbitration award handed down by the arbitrator or the arbitral tribunal based on bad faith or negligence in examining and deciding an arbitration dispute, cancellation can be requested to the District Court.

**Keywords:** *Reconstruction, Out-of-Court Dispute Resolution System, Justice and Legal Certainty*